

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pegawai atau tenaga kerja yang membantu tercapainya tujuan dari suatu instansi pemerintah merupakan definisi dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjalankan aktivitas di dalam instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuannya harus memperhatikan kualitas maupun kuantitas dengan cara mengutamakan kesejahteraan pegawai dan secara tidak langsung juga mempengaruhi kelangsungan hidup pegawai. Apabila berbicara tentang kesejahteraan pegawai tidak dapat dihindari bahwa tujuan awal dari setiap orang bekerja adalah untuk memperoleh gaji.

Salah satu sistem yang diterapkan pada suatu perusahaan adalah sistem informasi akuntansi pada prosedur penggajian. Sistem penggajian adalah suatu hal yang berkaitan dengan pengelolaan kesejahteraan pegawai, dimana harus diberikan perhatian khusus oleh instansi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan. Begitupun dengan prosedur penggajiannya sangat dibutuhkan juga oleh suatu instansi. Sistem penggajian rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan (fraud), kesalahan manusia (human error), bahkan ketidakandalan sistem dan ketidaktepatan sistem yang digunakan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan (Fidiya, 2010).

Dalam sistem penggajian, gaji memiliki arti yang sangat penting karena gaji merupakan cerminan nilai yang diperoleh atas kontribusi dan kinerja. Pengertian gaji adalah balas jasa yang berbentuk uang yang diterima oleh karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai karyawan yang memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan (Sikula, 2007).

Hak pegawai negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Pasal 7, yaitu “ Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya”. Pada dasarnya, dengan adanya penetapan tentang peraturan yang berhubungan dengan penggajian dari pemerintah akan membuat instansi lebih memperhatikan kembali penentuan dalam tarif gaji maupun upah tenaga kerja, sehingga sistem penggajian dapat terlaksanakan dengan semestinya tanpa ada masalah.

Suatu sistem penggajian dapat berjalan dengan baik karena adanya unsur-unsur sistem pengendalian. Pengendalian intern dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan dan kesalahan dalam penggajian. Sistem pengendalian intern akan menghasilkan informasi yang sangat dibutuhkan oleh pegawai yaitu meningkatkan ketelitian, ketidakefisienan, dapat dipercayai data akuntansi dan kecurangan. Keefektifan dan keefisienan dapat diukur dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern salah satunya yaitu terhadap prosedur penggajian.

Suatu instansi pemerintahan sebaiknya mempunyai sistem penggajian yang baik, karena bila instansi pemerintahan tersebut tidak memiliki suatu sistem penggajian yang baik, akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing. Banyak lembaga atau instansi pemerintah yang menggunakan sistem komputerisasi sebagai alat bantu untuk meningkatkan kreativitas dan aktivitas para pegawai, maka dari itu lembaga atau instansi pemerintah memiliki kompetensi yang tinggi agar terciptanya akuntabilitas serta transparansi terhadap informasi keuangan khususnya informasi penggajian.

Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Barat merupakan salah satu instansi non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kantor BPKP Perwakilan Sumatera Barat memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam berbagai aktivitas pengeluaran. Salah satunya adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam aktivitas pembayaran gaji pegawai.

Maka dari itu perlunya sistem penggajian untuk menjamin gaji yang diberikan oleh perusahaan benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak menerima. Sehingga dengan adanya sistem yang mengatur proses penggajian diharapkan dapat menghindari penyelewengan dan kecurangan yang akan merugikan perusahaan maupun pegawai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemilihan judul dan informasi yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat beserta aplikasi yang digunakan dalam prosedur tersebut?
2. Bagaimanakah Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Sistem Penggajian Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan dari magang ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur sistem informasi akuntansi penggajian pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat beserta aplikasi yang digunakan dalam prosedur tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sistem pengendalian internal dalam sistem penggajian Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

Kegiatan magang yang akan penulis lakukan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Bagi Instansi Tempat Magang

Sebagai pendukung dalam program pemerintah agar menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kemampuan profesionalitas dengan baik.

2. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis bagaimana alur dari prosedur penggajian pada suatu instansi dan mendapatkan pengalaman dalam membentuk kepribadian yang bertanggung jawab dan disiplin untuk menghadapi dunia kerja

3. Bagi Program Studi

Dapat digunakan sebagai kajian pustaka dan bahan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Jalan Bypass KM 14, Aie Pacah, Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25177, Indonesia. Pelaksanaan magang berlangsung selama 2 bulan atau 40 hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Bab 1 : Pendahuluan

Pada bab 1 ini berisi latar belakang yang menjadi dasar penelitian, dari latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah, tujuan kegiatan magang, manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu kegiatan magang dan sistematika penulisan laporan.

Bab 2 : Landasan Teori

Pada bab 2 ini membahas mengenai pengertian sistem, karakteristik sistem, pengertian penggajian, sistem penggajian, pengertian sistem akuntansi penggajian, fungsi sistem akuntansi penggajian, laporan yang dihasilkan dalam sistem akuntansi penggajian, pengertian prosedur, karakteristik prosedur, manfaat prosedur, peranan gaji, unsur-unsur gaji pegawai, catatan akuntansi.

Bab 3 : Gambaran Umum BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Pada bab 3 ini membahas tentang gambaran umum dari lembaga kegiatan magang yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, yang berisikan tentang sejarah BPKP, visi dan misi, fungsi, kedudukan dan fungsi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, produk dan layanan, dan struktur organisasi BPKP.

Bab 4 : Pembahasan

Pada bab 4 ini akan menjelaskan mengenai “ Sistem Penggajian pegawai dan Prosedur Penggajian Pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat”.

Bab 5 : Penutup

Pada bab 5 ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak yang terkait.